



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggung Jawaban Yaman Terhadap Serangan Intensif Pasukan Houthi di Laut Merah Yaman

Ayu Syaputri Lubis¹, Mirsa Astuti²

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia,

ayusyaputri1006@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, mirsaastuti@umsu.ac.id

Corresponding Author: ayusyaputri1006@gmail.com

Abstract: *Yemen, a country on the Arabian Peninsula, has attracted worldwide attention in recent years due to protracted conflicts across its territory. One of the biggest conflicts is the fighting between Yemeni government forces backed by a Saudi-led military coalition and Houthi rebel forces supported by Iran. The conflict in Yemen stems from political upheaval and regime change that began in 2011, similar to the wave of Arab revolutions in the region. However, the situation quickly turned into fighting between government forces backed by Arab countries and Houthi rebel forces who control Yemen's northern regions, including the capital city of Sana'a. This study uses normative research methods, also known as positive legal research methods, doctrinal legal research methods, or pure legal research methods. This normative research method studies written law (laws written in books) or traditions that have existed in society. This normative research uses mostly secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Yemen must increase its military strength, strengthen border security, and cooperate with its neighboring countries. In this case, regional mediation efforts carried out by Yemen's neighboring countries aim to improve regional stability and achieve a fair solution for all parties involved. This attack has an impact on the security, political, economic, and humanitarian fields, and this has an impact on overall regional development. The conflict in Yemen has significant consequences for the region and the world as a whole. By increasing tensions between Yemen and neighboring countries such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates, the conflict threatens regional security and stability. An escalation of the conflict could also threaten transnational security and strategic maritime trade routes around the Red Sea. In evaluating Yemen's responsibility for Houthi forces' intensified attacks on the Red Sea, it is important to consider the relevance of international law, including the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocols I and II, which govern the protection of civilians and medical personnel during armed conflict.*

Keyword: *Yemen, Houthi Forces, International Law.*

Abstrak: Yaman, sebuah negara di Semenanjung Arab, telah menarik perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir karena konflik yang berkepanjangan di seluruh wilayahnya. Salah satu konflik terbesar adalah pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman yang didukung

oleh koalisi militer pimpinan Arab Saudi dan pasukan pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran. Konflik di Yaman bermula dari pergolakan politik dan perubahan rezim yang dimulai pada tahun 2011, mirip dengan gelombang revolusi Arab di wilayah tersebut. Namun, situasi cepat berubah menjadi pertempuran antara pasukan pemerintah yang didukung oleh negara-negara Arab dan pasukan pemberontak Houthi yang menguasai wilayah utara Yaman, termasuk ibu kota Sana'a. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, atau metode penelitian hukum murni. Metode penelitian normatif ini mempelajari hukum yang tertulis (hukum yang tertulis dalam buku) atau tradisi yang telah ada di masyarakat. Penelitian normatif ini menggunakan sebagian besar data sekunder, yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Yaman harus meningkatkan kekuatan militernya, memperkuat keamanan perbatasan, dan bekerja sama dengan negara-negara tetangganya. dalam hal ini Upaya mediasi regional yang dilakukan oleh negara-negara tetangga Yaman bertujuan untuk meningkatkan stabilitas regional dan mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Serangan ini berdampak pada bidang keamanan, politik, ekonomi, dan kemanusiaan, dan ini berdampak pada perkembangan regional secara keseluruhan. Konflik di Yaman memiliki konsekuensi yang signifikan bagi wilayah itu dan dunia secara keseluruhan. Dengan meningkatkan ketegangan antara Yaman dan negara-negara tetangga seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, konflik ini mengancam keamanan dan stabilitas regional. Eskalasi konflik juga dapat mengancam keamanan lintas negara dan jalur perdagangan maritim strategis di sekitar Laut Merah. Dalam mengevaluasi tanggung jawab Yaman terhadap serangan intensif pasukan Houthi di Laut Merah, penting untuk mempertimbangkan relevansi hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II, yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan personel medis selama konflik bersenjata.

Kata Kunci: Yaman, Pasukan Houthi, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Yaman, sebuah negara yang terletak di Semenanjung Arab, telah menjadi pusat perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir karena konflik berkepanjangan yang terjadi di wilayahnya. Konflik yang paling mencolok adalah pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman yang didukung oleh koalisi militer pimpinan Arab Saudi, dan pasukan pemberontak Houthi yang mendapatkan dukungan dari Iran. Dalam konteks ini, Serangan Intensif Pasukan Houthi di Laut Merah Yaman menunjukkan eskalasi kekerasan yang mengkhawatirkan dan menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab Yaman dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negaranya. (Abdul Hamid et al., 2022)

Perang bukanlah wahana untuk membayangkan seseorang mengejar status, properti, pertumbuhan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan pendudukan teritorial, seperti yang terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi di negara-negara imperialis di seluruh dunia. Namun dalam Islam, satu-satunya tujuan perang adalah untuk mengagungkan Allah, melindungi agama-Nya, dan memastikan bahwa masyarakat bebas menganut agama apa pun yang mereka inginkan. Itulah tujuan deklarasi perang Islam. Menurut Q.S. Al-Baqarah ayat 190 diatas, Allah juga memberikan hikmah tentang etika berperang, artinya tidak ada muslim yang berperang berhak membunuh orang-orang kafir yang tidak berperang. Hal ini tidak berarti bahwa menyerang orang lain yang tidak membela diri tidak diperbolehkan. Misalnya, ketika mendukung orang-orang kafir yang menentang umat Islam, perempuan, anak-anak, dan orang tua tidak menyerang umat Islam. Mereka adalah individu-individu yang tidak seharusnya menjadi fokus pertempuran. (Astuti, 2020)

Konteks Konflik di Yaman: Konflik di Yaman bermula dari pergolakan politik dan perubahan rezim yang dimulai pada tahun 2011, mirip dengan gelombang revolusi Arab di wilayah tersebut. Namun, situasi cepat berubah menjadi pertempuran antara pasukan pemerintah yang didukung oleh negara-negara Arab dan pasukan pemberontak Houthi yang menguasai wilayah utara Yaman, termasuk ibu kota Sana'a. Konflik ini telah mengakibatkan kehancuran massal, krisis kemanusiaan, dan ketidakstabilan politik yang terus berlanjut. (Muttaqien, 2017)

Pengaruh Serangan Intensif Pasukan Houthi di Laut Merah: Serangan intensif pasukan Houthi di Laut Merah Yaman menandai perubahan signifikan dalam dinamika konflik. Laut Merah merupakan jalur maritim penting yang strategis, dengan peranan krusial dalam perdagangan global dan aliran minyak dunia. Serangan yang terjadi di wilayah ini memperlihatkan ambisi militer pasukan Houthi untuk memperluas kendali mereka di seluruh wilayah Yaman dan mempengaruhi stabilitas di kawasan tersebut. Ancaman serius yang ditimbulkan oleh serangan-serangan semacam ini memperumit upaya perdamaian dan menambah ketegangan antara pemerintah Yaman dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. (Rahman, 2019)

Tanggung Jawab Yaman dalam Menghadapi Ancaman: Dalam menghadapi serangan intensif pasukan Houthi di Laut Merah, tanggung jawab Yaman sebagai negara berdaulat dan pemerintah yang sah adalah untuk melindungi kedaulatan wilayahnya, melindungi warga negara dari ancaman eksternal, dan menjaga stabilitas keamanan regional. Tindakan yang diambil oleh Yaman dalam menanggapi serangan tersebut akan memberikan gambaran tentang kesiapannya untuk menghadapi tantangan keamanan yang kompleks dan menghormati hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan bersenjata.

Relevansi Hukum Internasional: Dalam mengevaluasi tanggung jawab Yaman terhadap serangan intensif pasukan Houthi di Laut Merah, penting untuk mempertimbangkan relevansi hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II, yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan personel medis selama konflik bersenjata. Kepatuhan Yaman terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional akan menjadi parameter penting dalam menilai tanggung jawabnya dalam menghadapi serangan semacam ini.

Dengan demikian, serangan intensif pasukan Houthi di Laut Merah Yaman menjadi peristiwa yang penting dalam dinamika konflik di Yaman. Tanggung jawab Yaman dalam menghadapi ancaman tersebut mencerminkan kesiapannya untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara serta ketaatannya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata. (Tandayu & Wibowo, 2020)

Karena itu, penelitian ini diinisiasi oleh penulis untuk mengetahui bagaimana Yaman bertanggung jawab terhadap serangan intensif pasukan Houthi di Laut Merah Yaman, dan mencari tahu apa saja strategi diplomasi dan hubungan internasional dalam penyelesaian konflik Yaman terhadap serangan pasukan Houthi di Laut Merah serta bagaimana Dampak Serangan Intensif Pasukan Houthi Terhadap Stabilitas Dan Keamanan Regional Di Sekitar Laut Merah

METODE

Metode penelitian normatif yang disebut juga dengan metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, atau metode penelitian hukum murni digunakan dalam penelitian yang dilakukan untuk tulisan ini. Penelitian hukum normatif ini melihat pada adat istiadat yang menjadi bagian dari masyarakat atau hukum tertulis, atau peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam kitab. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan sebagian besar data sekunder yang digunakan dalam studi normatif ini.

Teknik penelitian normatif yang sering juga disebut dengan teknik penelitian hukum, teknik penelitian hukum positif, teknik penelitian hukum doktrinal, atau teknik penelitian

hukum murni digunakan dalam pendekatan penelitian ini. Penelitian normatif dapat didasarkan pada norma-norma dan aturan-aturan masyarakat atau mungkin berkonsentrasi pada hukum dan peraturan tertulis (hukum dalam buku). Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian kepustakaan yang sangat mengandalkan sumber-sumber sekunder, termasuk teks-teks hukum primer, sekunder, dan tersier. Mayoritas informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari aturan atau undang-undang terkodifikasi yang penting dalam kerangka masyarakat.

Sejumlah pakar hukum asal Indonesia, antara lain Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, dan Bambang Sugono, mencatat adanya perbedaan pendapat mengenai cara mengkategorikan kajian hukum normatif. Karena penelitian inventarisasi hukum positif pada hakikatnya adalah pengumpulan informasi hukum dan tidak mengikuti standar penelitian ilmiah, maka beberapa ahli berpendapat bahwa penelitian tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kategori penelitian hukum normatif. Untuk menjawab kekhawatiran yang mengemuka dalam kajian penelitian hukum normatif, penulis bermaksud menganalisis pembicaraan hukum normatif dari berbagai kajian dengan mempertimbangkan kerangka pemikiran tersebut. (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab Yaman terhadap serangan intensif pasukan Houthi di Laut Merah Yaman

Sebagai negara berdaulat, Yaman memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayahnya dari ancaman internal dan eksternal. Serangan intensif yang dilancarkan oleh pasukan Houthi di Laut Merah merupakan ancaman langsung terhadap integritas wilayah Yaman dan stabilitas keamanan regional. Dalam menghadapi serangan semacam itu, Yaman bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggapi ancaman tersebut dengan cara yang sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Tanggung jawab Yaman dalam hal ini mencakup peningkatan kekuatan militer, peningkatan keamanan perbatasan, serta kerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional untuk menghadapi ancaman bersama. Langkah-langkah yang diambil oleh Yaman harus diarahkan pada menjaga kedaulatan negara dan mencegah perluasan pengaruh kelompok pemberontak di wilayahnya. Selain itu, Yaman juga bertanggung jawab untuk mengamankan jalur perdagangan dan transportasi laut di sepanjang Laut Merah, yang memiliki dampak penting bagi perekonomian nasional dan regional. (Oktaviani et al., 2022)

Selain tanggung jawabnya terhadap kedaulatan dan keamanan negara, Yaman juga memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil dari dampak buruk konflik bersenjata. Serangan intensif pasukan Houthi di Laut Merah dapat mengakibatkan kerugian besar pada warga sipil dan infrastruktur kritis, seperti pelabuhan, fasilitas energi, dan instalasi air. Dalam konteks ini, Yaman bertanggung jawab untuk meminimalkan risiko kerugian sipil selama operasi militer, serta memberikan perlindungan terhadap warga sipil yang terdampak konflik. Hal ini termasuk memberikan peringatan dini sebelum melakukan serangan militer yang dapat membahayakan warga sipil, mengadopsi taktik dan strategi militer yang memperhitungkan keberadaan warga sipil, serta memastikan bahwa pasukan Yaman mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam setiap tindakan mereka. Tanggung jawab Yaman terhadap perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil juga melibatkan kerja sama dengan organisasi kemanusiaan internasional dan lembaga donor untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik. Yaman juga harus memberikan akses yang aman dan terjamin bagi bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pihak luar, serta memfasilitasi upaya-upaya rekonsiliasi dan perdamaian yang dapat mengakhiri konflik secara berkelanjutan. Dengan demikian, tanggung jawab Yaman terhadap serangan intensif pasukan Houthi di Laut Merah mencakup perlindungan terhadap kedaulatan

dan keamanan negara, serta perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dari dampak buruk konflik bersenjata. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, Yaman perlu mengambil langkah-langkah konkret yang sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan, serta berupaya untuk mencapai solusi politik yang berkelanjutan untuk konflik yang sedang berlangsung. (Heriamsal et al., 2024)

Perspektif hukum internasional juga memainkan peran penting dalam menentukan kewajiban Yaman terhadap serangan intensif pasukan Houthi di Laut Merah. Kewajiban ini didasarkan pada serangkaian instrumen hukum internasional yang mengatur perilaku negara-negara dalam konteks konflik bersenjata. penjelasan lebih rinci tentang kewajiban Yaman dari perspektif hukum internasional antara lain :

1. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II adalah instrumen hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap korban konflik bersenjata, termasuk warga sipil, personel medis, dan tawanan perang. Yaman, sebagai negara yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan pasukan Houthi, diikat oleh ketentuan-ketentuan ini dan memiliki kewajiban untuk mematuhi mereka. Di bawah Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, Yaman memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran dan memberikan perawatan medis yang tepat kepada korban perang. Hal ini mencakup larangan terhadap serangan yang tidak proporsional terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, serta perlindungan terhadap fasilitas medis dan personel medis.

2. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional

Selain Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, Yaman juga terikat oleh prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang lebih luas. Prinsip-prinsip ini mencakup prinsip proporsionalitas, yang menuntut bahwa serangan militer harus sebanding dengan tujuan yang dikejar, serta prinsip perlindungan terhadap populasi sipil, yang menekankan perlunya meminimalkan risiko kerugian sipil selama operasi militer. Yaman juga harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari hukum internasional, seperti prinsip keadilan, belas kasihan, dan martabat manusia. Prinsip-prinsip ini menuntut bahwa Yaman harus menghormati hak asasi manusia dan menjaga keberadaan warga sipil dari bahaya dan penderitaan yang tidak perlu.

3. Kewajiban untuk Memastikan Kepatuhan dan Penegakan Hukum

Selain memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum humaniter internasional, Yaman juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di wilayahnya mematuhi hukum tersebut. Ini mencakup tindakan untuk mencegah dan menanggapi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh pasukan Houthi atau pihak lain yang terlibat dalam konflik. Yaman juga memiliki kewajiban untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh personel militernya sendiri dan, jika terbukti, mengambil tindakan disiplin yang sesuai terhadap pelaku pelanggaran. Hal ini penting untuk memastikan pertanggungjawaban dan keadilan dalam konteks konflik bersenjata. Dengan demikian, dari perspektif hukum internasional, Yaman memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan, serta prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang lebih luas. Yaman juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan penegakan hukum di wilayahnya, serta untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil dari dampak buruk konflik bersenjata. (Hadi et al., 2023)

Sementara Yaman memiliki kewajiban hukum untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil dari serangan pasukan Houthi, kenyataannya mungkin lebih rumit. Situasi di Yaman sering kali terjadi pertempuran di wilayah yang padat penduduk, sehingga sulit bagi Yaman untuk memastikan bahwa tindakan militer mereka tidak merugikan warga sipil. Selain itu, kehadiran pasukan Houthi yang menggunakan taktik gerilya dan menyamar dapat membuat tanggapan militer Yaman menjadi lebih sulit untuk dilakukan tanpa menimbulkan

kerugian yang signifikan. Namun demikian, Yaman masih bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi warga sipil sebanyak mungkin, seperti memberikan peringatan dini sebelum meluncurkan serangan militer dan meminimalkan risiko kerugian sipil selama operasi militer. Yaman juga dapat bekerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi kemanusiaan untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terdampak konflik. Dengan demikian, tanggung jawab Yaman terhadap serangan pasukan Houthi di Laut Merah melibatkan keseimbangan yang rumit antara perlindungan kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan internasional. Meskipun tantangan yang dihadapi oleh Yaman mungkin kompleks, penting bagi negara ini untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan melakukan segala upaya yang diperlukan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan warga sipil.

Strategi Diplomasi Dan Hubungan Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Yaman Terhadap Serangan Pasukan Houthi Di Laut Merah

Upaya mediasi dan negosiasi oleh pihak-pihak internasional memainkan peran kunci dalam mencari solusi damai untuk konflik Yaman. Negara-negara dan organisasi internasional seperti PBB, Liga Arab, dan Uni Eropa telah berusaha untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan politik yang memungkinkan transisi politik yang stabil dan inklusif serta mengakhiri konflik bersenjata. Di samping itu, terdapat pula upaya-upaya mediasi regional yang melibatkan negara-negara tetangga Yaman seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut. Mediasi regional ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas regional dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. (Latupella et al., 2024)

1. Peran PBB sebagai Fasilitator Mediasi

PBB telah memainkan peran utama sebagai fasilitator mediasi dalam konflik Yaman. Melalui berbagai badan dan mekanisme, termasuk Penasihat Khusus PBB untuk Yaman dan Misi Pendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Yaman (UNMHA), PBB berupaya untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi. Upaya mediasi PBB bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian konflik, mempromosikan kepercayaan antara pihak yang bersengketa, dan menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

2. Pertemuan Diplomatik dan Konferensi Internasional

Selain peran mediasi PBB, terdapat pula pertemuan diplomatik dan konferensi internasional yang bertujuan untuk mendukung upaya penyelesaian konflik di Yaman. Contohnya adalah Konferensi Stockholm pada Desember 2018 yang diselenggarakan oleh PBB dengan tujuan memfasilitasi dialog antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan gencatan senjata di kota pelabuhan Hudaydah dan bertujuan untuk membuka jalan bagi pembicaraan lebih lanjut tentang penyelesaian konflik.

3. Peran Negara-negara dan Organisasi Regional

Negara-negara dan organisasi regional juga berperan dalam upaya mediasi dan negosiasi konflik Yaman. Misalnya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah terlibat dalam upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian di Yaman, termasuk melalui perundingan dengan kelompok Houthi. Liga Arab juga telah mendukung upaya mediasi PBB dan berupaya untuk memfasilitasi dialog politik antara pihak yang terlibat dalam konflik. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa Liga Arab (LAS) telah memberikan dukungan politik dan kemanusiaan untuk membantu penyelesaian konflik. (Ridhani, 2021)

Upaya mediasi dan negosiasi yang dilakukan oleh berbagai pihak internasional, termasuk PBB, negara-negara regional, dan organisasi internasional, menjadi salah satu strategi penting dalam penyelesaian konflik Yaman terhadap serangan pasukan Houthi di

Laut Merah. Dengan melibatkan berbagai aktor dan memanfaatkan berbagai forum diplomasi, upaya ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung dialog politik, gencatan senjata, dan akhirnya perdamaian yang berkelanjutan di Yaman.

Diplomasi multilateral dan pembentukan koalisi internasional menjadi langkah selanjutnya strategi penting dalam penyelesaian konflik Yaman terhadap serangan pasukan Houthi di Laut Merah. Pendekatan ini melibatkan kerja sama antara berbagai negara dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama dalam meredakan ketegangan, memfasilitasi dialog politik, dan memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan. Diplomasi multilateral melibatkan kerja sama antara berbagai negara dan organisasi internasional untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Yaman. Melalui forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara anggota dan lembaga internasional berupaya untuk memfasilitasi dialog politik antara pihak yang terlibat dalam konflik. Misalnya, PBB telah menggelar pertemuan tingkat tinggi dan konferensi internasional untuk membahas situasi di Yaman dan mencari solusi bersama. Diplomasi multilateral juga memungkinkan bagi negara-negara anggota untuk menyampaikan pesan bersama kepada pihak-pihak yang bersengketa tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Selain diplomasi multilateral, pembentukan koalisi internasional juga menjadi strategi penting dalam penyelesaian konflik Yaman. Negara-negara dan organisasi regional membentuk koalisi untuk mengkoordinasikan upaya mereka dalam mendukung perdamaian dan stabilitas di Yaman. Contohnya adalah Koalisi Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang telah melakukan operasi militer dan upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik di Yaman. Koalisi ini juga bekerja sama dengan negara-negara lain di luar wilayah Arab untuk mendukung upaya perdamaian, termasuk melalui penyaluran bantuan kemanusiaan dan pembangunan. (Andrini, 2022)

Diplomasi multilateral dan pembentukan koalisi internasional memiliki implikasi penting dalam penyelesaian konflik Yaman. Melalui kerja sama lintas negara dan lintas lembaga, upaya ini meningkatkan tekanan politik dan diplomatik terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mendorong mereka menuju meja perundingan. Selain itu, diplomasi multilateral juga memungkinkan bagi negara-negara anggota untuk menyatukan sumber daya mereka dalam menyediakan bantuan kemanusiaan yang diperlukan bagi warga Yaman yang terkena dampak konflik. Namun, efektivitas diplomasi multilateral dan koalisi internasional dalam penyelesaian konflik Yaman masih menghadapi tantangan. Perbedaan kepentingan dan pendekatan di antara negara-negara anggota, serta ketegangan geopolitik yang kompleks di kawasan tersebut, dapat menghambat upaya bersama dalam mencapai kesepakatan politik yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terlibat untuk melanjutkan diplomasi multilateral dan memperkuat kerja sama internasional guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Yaman. (Timur et al., 2021)

Selain upaya mediasi dan diplomasi, bantuan kemanusiaan dan pembangunan juga menjadi bagian integral dari strategi penyelesaian konflik Yaman. Negara-negara dan organisasi internasional menyediakan bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang berkembang di Yaman akibat konflik bersenjata. Bantuan ini mencakup penyediaan makanan, air bersih, obat-obatan, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan kepada jutaan warga yang terdampak. Selain itu, bantuan pembangunan juga diberikan untuk mendukung pemulihan dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat konflik. Program pembangunan ini bertujuan untuk memperbaiki layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, serta untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui upaya-upaya ini, strategi diplomasi dan hubungan internasional berperan dalam meredakan ketegangan, memfasilitasi dialog politik, dan memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Yaman. Dengan melibatkan negara-negara dan organisasi internasional

secara luas, upaya-upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian konflik dan pemulihan negara.(Yulianti, n.d.)

Dampak Serangan Intensif Pasukan Houthi Terhadap Stabilitas Dan Keamanan Regional Di Sekitar Laut Merah

Dampak serangan intensif pasukan Houthi terhadap stabilitas dan keamanan regional di sekitar Laut Merah memiliki implikasi yang luas dan kompleks bagi negara-negara tetangga dan kawasan di sekitarnya. Dampak ini meliputi aspek keamanan, politik, ekonomi, dan kemanusiaan, yang mempengaruhi dinamika regional secara keseluruhan. Dibawah ini akan dijelaskan secara spesifik mengenai dampak serangan pasukan Houthi terhadap stabilitas dan keamanan regional. Antara lain :

1. Keamanan dan Stabilitas Regional

Serangan intensif pasukan Houthi di Laut Merah membawa implikasi serius terhadap keamanan dan stabilitas regional. Konflik bersenjata yang terus berlanjut di Yaman telah menciptakan ketegangan antara Yaman dan negara-negara tetangga, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Ketegangan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral, tetapi juga memperburuk dinamika politik dan keamanan di kawasan tersebut secara keseluruhan. Eskalasi konflik di Yaman berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan regional. Pasukan Houthi telah melancarkan serangan rudal dan serangan udara terhadap target-target di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, termasuk infrastruktur penting seperti bandara dan fasilitas minyak. Ancaman ini tidak hanya meningkatkan risiko konflik lintas negara, tetapi juga dapat merusak ekonomi regional dan mempengaruhi stabilitas politik di kawasan Teluk. Selain itu, ketegangan di Laut Merah juga dapat mempengaruhi jalur perdagangan maritim yang penting bagi perdagangan internasional. Gangguan terhadap lalu lintas kapal dan risiko terhadap keamanan pelayaran dapat menyebabkan peningkatan biaya pengiriman dan premi asuransi, serta memperlambat arus perdagangan antara Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Hal ini dapat mengganggu pasokan energi dan komoditas dunia, serta merugikan perekonomian global secara keseluruhan. (Hadi et al., 2023)

2. Pengaruh Terhadap Jalur Perdagangan Maritim

Laut Merah merupakan salah satu jalur perdagangan maritim yang paling sibuk di dunia, menghubungkan Laut Tengah dengan Samudera Hindia melalui Terusan Suez. Serangan pasukan Houthi di Laut Merah dapat mengancam kelancaran lalu lintas kapal dan keamanan pelayaran di jalur perdagangan ini. Keamanan dan stabilitas di sekitar Laut Merah sangat penting bagi perekonomian global karena sebagian besar perdagangan internasional melewati jalur ini. Gangguan terhadap jalur perdagangan maritim dapat memiliki dampak langsung terhadap perdagangan dunia, terutama pada pasokan minyak dan komoditas lainnya. Ketidakstabilan di Laut Merah dapat meningkatkan ketidakpastian di pasar energi global dan menyebabkan fluktuasi harga minyak yang signifikan. Selain itu, perusahaan-perusahaan pelayaran mungkin perlu membayar premi asuransi yang lebih tinggi atau mengambil rute alternatif yang lebih mahal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan biaya perdagangan dan merugikan perekonomian negara-negara pengimpor dan eksportir. Gangguan terhadap jalur perdagangan maritim di Laut Merah juga dapat menyebabkan ketidakpastian politik dan ekonomi di kawasan sekitarnya. Negara-negara yang tergantung pada perdagangan maritim, termasuk Mesir, Sudan, dan Eritrea, mungkin mengalami dampak langsung dari gangguan tersebut, baik dalam hal penurunan pendapatan dari biaya transit maupun risiko terhadap stabilitas ekonomi dan politik mereka. Oleh karena itu, perlindungan jalur perdagangan maritim di Laut Merah menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi global. (Shalihah & Sidik, 2021)

3. Krisis Kemanusiaan dan Pengungsi

Konflik bersenjata di Yaman, termasuk serangan pasukan Houthi, telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah di wilayah tersebut. Jutaan penduduk Yaman menghadapi kelaparan, kekurangan air bersih, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan yang memadai. Serangan terhadap infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air minum juga telah meningkatkan jumlah korban sipil dan pengungsi internal. Dampak ini tidak hanya dirasakan di Yaman, tetapi juga oleh negara-negara tetangga yang menerima pengungsi Yaman, menimbulkan beban tambahan bagi sistem penerimaan pengungsi mereka. Namun sering sekali (Hakiki & Sari, 2022)

4. Implikasi dan Tindakan

Dampak serangan intensif pasukan Houthi terhadap stabilitas dan keamanan regional membutuhkan respons yang cepat dan komprehensif dari komunitas internasional. Langkah-langkah yang perlu diambil termasuk:

- a. Memperkuat diplomasi multilateral dan upaya mediasi untuk mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan dan dialog politik yang inklusif di Yaman.
- b. Meningkatkan kerja sama keamanan regional dan pertukaran informasi untuk mengatasi ancaman bersama dan mencegah eskalasi konflik yang lebih lanjut.
- c. Meningkatkan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi korban konflik, termasuk pengungsi dan warga sipil yang terdampak.
- d. Mendukung upaya untuk mengatasi akar penyebab konflik di Yaman, termasuk ketidaksetaraan sosial-ekonomi, akses terhadap sumber daya, dan tuntutan politik yang tidak terpenuhi.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, komunitas internasional dapat membantu mengurangi dampak serangan pasukan Houthi terhadap stabilitas dan keamanan regional, serta mempromosikan perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di Yaman dan sekitarnya. (Salsabila, 2022)

KESIMPULAN

1. Konflik di Yaman memiliki implikasi yang luas dan serius bagi kawasan tersebut dan juga dunia secara keseluruhan. Konflik ini mengancam keamanan dan stabilitas regional dengan meningkatkan ketegangan antara Yaman dan negara-negara tetangga seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Eskalasi konflik dapat memicu ancaman terhadap keamanan lintas negara dan jalur perdagangan maritim yang strategis di sekitar Laut Merah, berdampak pada ekonomi global dan stabilitas politik di kawasan Teluk.
2. Upaya mediasi dan negosiasi oleh pihak-pihak terkait, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara regional, merupakan langkah kunci dalam mengatasi konflik Yaman. Proses mediasi perlu didorong untuk mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan dan dialog politik yang inklusif di antara semua pihak yang terlibat dalam konflik. Selain itu, diplomasi multilateral dan kerja sama antar negara-negara regional juga penting untuk memperkuat kerjasama keamanan dan membangun kepercayaan di antara negara-negara tetangga. Selain upaya mediasi dan diplomasi, dukungan dari komunitas internasional dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi juga diperlukan untuk membantu memulihkan negara Yaman dan memperbaiki kondisi kemanusiaan yang mengerikan akibat konflik. Selain itu, penyelesaian konflik di Yaman juga memerlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah Yaman, pasukan Houthi, dan negara-negara regional dan internasional lainnya.
3. Serangan pasukan Houthi di Laut Merah meningkatkan risiko konflik lintas negara dan menimbulkan ketidakpastian terhadap stabilitas regional. Konflik bersenjata di Yaman telah menciptakan ketegangan antara Yaman dan negara-negara tetangga seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. Gangguan Terhadap Jalur Perdagangan Maritim: Gangguan terhadap

jalur perdagangan maritim di Laut Merah mengancam kelancaran lalu lintas kapal dan keamanan pelayaran, yang berdampak pada perdagangan internasional dan ekonomi global. Ini mempengaruhi pasokan energi dan komoditas dunia serta memperburuk stabilitas ekonomi dan politik di negara-negara sekitarnya.

REFERENSI

- Abdul Hamid, M. A., Abdul Rahman, M. Z., & Raja Sulong, R. H. (2022). Faktor-Faktor Konflik Di Republik Yaman Berdasarkan Perspektif Abdul Hadi Awang Dan Kesannya Kepada Keadilan Sosial Factors of Conflict in The Republic of Yemen Based on Abdul Hadi Awang's Perspective and Its Impact on Social Justice. *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 9(2), 29–46. <https://doi.org/10.22452/ris.vol9no2.2>
- Andrini, G. F. (2022). Krisis dalam Konflik : Keamanan Manusia Yaman semasa Perang Saudara 2015-2021. *Jurnal ICMES*, 6(2), 99–124. <https://icmes.org/jurnal/index.php/jurnalICMES/article/download/137/74/>
- Astuti, M. (2020). Protection of Disappeared and Dead as a Result of War According to International Humanitarian Law and Islamic Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 53–61. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v1i2.11>
- Hadi, A. S., Purwono, A., Wahid, U., & Semarang, H. (2023). *FAKTOR PENDORONG INTERVENSI MILITER ARAB SAUDI DALAM KONFLIK YAMAN*. 4, 14–25.
- Heriamsal, K., Manurung, F. B., & Rahmat, R. K. (2024). Eksternalisasi Konflik Internal Yaman Dalam Kerangka Analisis Internationalization of Conflict Theory. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 4(01), 31–43. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v4i01.32859>
- Latupella, G. C. L., Rahadyan, & Debi Setiawati. (2024). Dampak Politik Konflik Yaman Tahun 2011. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 7–13. <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v5i1.3548>
- Muttaqien, M. (2017). Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional dan Global. *Jurnal Global & Strategis*, 9(2), 262. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.262-276>
- Oktaviani, V., Putri, N. A. R., & Nulhaqim, S. A. (2022). Upaya Organisasi Internasional Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Di Yaman. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 161. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40248>
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., P. . (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Rahman, S. (2019). Di Timur Tengah Pasca Arab Spring. *Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilmu Sosial*, 12(02), 111–129.
- Ridhani, V. (2021). Arms Trade Between United Kingdom with Saudi Arabia in Yemen Conflict associated with Arms Trade Treaty 2014 and International Law. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076><https://doi.org/>
- Salsabila, A. D. (2022). Implications of Diplomatic Termination By Canada, Saudi Arabia, and Yemen on Iran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 482–490. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Shalihah, F. A., & Sidik, H. (2021). Pelanggaran Hukum Internasional dalam Konflik Yaman Tahun 2015-2019 dan Akibatnya terhadap Situasi Krisis Kemanusiaan. *Jurnal ICMES*, 5(1), 22–42. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i1.100>

- Tandayu, T. R., & Wibowo, A. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Blokade Di Pelabuhan Hudaydah Yaman Yang Menyebabkan Kematian Anak-Anak. *Reformasi Hukum Trisakti*, 2(1), 1–27. <https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.8849>
- Timur, K. K., Wahyu, L., & Utama, P. (2021). *Firmanda Taufiq*. <http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc462604/.pdf>
- Yulianti, D. (n.d.). *Peran Liga Arab Pada Konflik di Timur Tengah Dalam Perspektif Ekonomi-Politik Internasional*.
- United Nations Security Council. (2022). "United Nations Mediation Support Unit." Diakses dari: <https://peacemaker.un.org/yemen-mechanism>
- United Nations. (2018). "Press Conference on Yemen Peace Talks - Media Stakeout (14 December 2018)." Diakses dari: <https://www.un.org/press/en/2018/sgsm19333.doc.htm>
- United Nations. (2022). "United Nations Yemen Humanitarian Fund." Diakses dari: <https://www.unocha.org/yemen>
- The League of Arab States. (2022). "Arab League." Diakses dari: <https://www.arableagueonline.org/>